

**ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2004-2007**

TUGAS AKHIR



*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menyelesaikan Program Diploma IV (D - IV)
Politeknik Universitas Andalas*

Oleh

MHD FIKRATUL AZIZ
06 096 022



**PROGRAM BEASISWA UNGGULAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
DIPLOMA IV AKUNTANSI PEMERINTAHAN
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG MILIK
2009** PT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

TERDAFTAR

TANGGAL: 17-11-09
NOMOR BI: 309.072.0201



| | | |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| No. Alumni Universitas | Mhd Fikratul Aziz | No. Alumni Fakultas |
|------------------------|-------------------|---------------------|

a). Tempat/Tgl. Lahir: Sei Sarik, 03/10/1987 b) Nama Orang Tua: Drs.Sofyan Jamal dan Azimar S.Pd c) Fakultas: Politeknik Negeri Padang d) Jurusan: Akuntansi Pemerintahan e) NIM: 06096022 f) Tgl Lulus: 27 Agustus 2009 g) Predikat Lulus :Memuaskan h) IPK:2,75 i) Lama studi: 32 bulan k) Alamat orang tua: Jln. H. Agus Salim No.36 Perumnas Pariaman

Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2004 s/d 2007
Tugas Akhir DIV oleh Mhd Fikratul Aziz.
Pembimbing: 1). Desi Handayani,SE.Ak., 2). Arnel Yentifa,SE.Ak

ABSTRAK

Analisis laporan keuangan dimaksudkan untuk membantu memahami laporan keuangan, menafsirkan angka-angka dalam laporan keuangan, mengevaluasi laporan keuangan, dan memanfaatkan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kinerja, posisi keuangan dan arus kas dari Pemerintah Kota Pariaman. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu manajemen pemerintah dalam menganalisis laporan keuangannya dan membantu *stakeholder eksternal* dalam memahami laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pariaman tahun 2004-2007. Teknik analisis yang dipakai adalah *time series technique*, dengan alat ukur berupa analisis pertumbuhan, analisis trend, rasio keuangan, analisis keserasian belanja, analisis arus kas perkomponen, analisis arus kas bebas serta analisis ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa posisi keuangan, kinerja dan arus kas Pemerintah Kota Pariaman cenderung membaik, ini dibuktikan dengan pertumbuhan arus kas mencapai 219 %. Perhitungan dengan menggunakan rasio keuangan menunjukkan hasil yang baik yakni perbandingan tiap rasionya selalu melebihi standar yang dianggap aman yakni < 1 . Tingkat ketaatan Pemerintah Kota Pariaman terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan semakin baik, ini dibuktikan dalam hal penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Pariaman menggunakan PP No. 24 Tahun 2005 yang dituangkan dalam aplikasi SIMDA.

Tugas Akhir telah dipertahankan didepan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Agustus 2009
Abstrak telah disetujui oleh penguji:

Penguji:

| | | | | |
|--------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Tanda Tangan | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Nama Terang | Ferdawati, SE M.Sc.Ak | Nurul Fauzi, SE,MM.Ak | Dedy Deynis SE,MM.Ak | Desi Handayani, SE.Ak |

Mengetahui:

Ketua Jurusan Nurul Fauzi, SE,MM.Ak
Nama



Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus:

| | | | |
|---------------------------|------|-------------------------------|--------------|
| Nomor alumni Fakultas: | Nama | Petugas Fakultas/ Universitas | Tanda Tangan |
| Nomor alumni Universitas: | Nama | | Tanda Tangan |

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan sistem organisasi khususnya Institusi Pemerintah berbasiskan *good governance* dengan prinsip-prinsip efisien, efektif terbuka, adil, bertanggungjawab dan dapat pertanggungjawabkan telah dimulai dengan dikeluarkannya perangkat-perangkat hukum yang mengatur Institusi Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah. Respons terhadap kebutuhan pembentukan sistem *governance* pada beberapa tahun terakhir sangat tinggi. Hal ini belajar dari pengalaman akibat banyaknya organisasi yang memiliki kinerja yang sangat tidak mengembirakan. Disamping itu, tidak efektifnya perangkat hukum dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan organisasi telah menjadikan perhatian banyak akademis dan praktisi untuk melakukan penataan terhadap sistem *governance*.

Tidak mengembirakannya kinerja organisasi dan tidak efektifnya perangkat hukum dan perundang-undangan yang ada tidak saja melanda pada "*profit organization*" tetapi juga "*non profit organization*" tidak terkecuali institusi pemerintah. Dibeberapa negara Eropa Timur, Asia Pasifik, dan Afrika, keinginan untuk membangun sistem *good governace* telah bergerak dengan sangat cepat dan kokoh melalui pembangunan standar-standar akuntansi dan keuangan untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dengan cara pembentukan ataupun revalitas organisasi profesi sektor publik. Pembangunan Standar Akuntansi Sektor Publik diharapkan dapat menjadi pijakan hukum yang sangat kuat dan jelas bagaimana pengelolaan sumber daya ekonomi Pemerintah

harus dilaporkan secara adil, terbuka, dan dapat dipertanggung jawabkan. Dengan demikian, pertanggung jawaban para Eksekutif Pemerintah dapat dinilai apakah mereka sudah mengelola sumber daya ekonomi secara efektif, produktif dan efisien dalam rangka memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat.

Salah satu mewujudkan pemerintahan yang *good governance* adalah akuntabilitas atau dapat dipertanggungjawabkan, dimana Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Di negara Indonesia paham yang dianut adalah paham demokrasi, demokrasi sebenarnya tidak lepas dari prinsip dasar yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat. Pemerintahan demokrasi menjalankan dan mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara dengan mengeluarkan sejumlah aturan serta mengambil dan menggunakan sumber dana masyarakat. Jadi dalam pencapaian tuntutan *good governance* tersebut, maka dalam setiap urusannya Pemerintah wajib memberikan pertanggungjawabannya atas semua aktivitasnya kepada masyarakat.

Salah satu akuntabilitas Pemerintah tersebut adalah akuntabilitas dari segi pelaporan keuangan dimana laporan keuangan dapat dibaca oleh penggunanya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang pada akhirnya mengeluarkan peraturan Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengatur bagaimana kebijakan akuntansi pemerintah harus diukur, dicatat dan dilaporkan secara terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya standar akuntansi pemerintah yang merupakan pedoman penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas sehingga informasi dalam laporan keuangan yang disajikan

tersebut dapat memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan, tanpa membedakan kepentingan masing-masing.

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dimana dengan laporan keuangan tersebut dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Penggunaan laporan keuangan terdiri dari beberapa kalangan baik Internal maupun Eksternal. Namun dari beberapa kalangan tersebut memiliki kendala yakni kurang pahamiannya tentang konsep akuntansi, begitu juga dalam membaca dan menafsirkan angka-angka dari laporan keuangan pemerintah, maka dari keterbatasan tersebut diperlukanlah analisis laporan keuangan untuk memudahkan para pengguna laporan keuangan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan kajian ini yakni **“ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2004-2007”**

BAB LIMA
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari analisis terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Pariaman untuk tahun 2004 sampai tahun 2007 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pemerintahan Kota Pariaman secara keuangan sangat Likuid dan Solvabel.
2. Kinerja Anggaran Pemerintahan Kota Pariaman mengalami pertumbuhan pendapatan yang positif, walaupun kinerja Pemerintahan Kota Pariaman tiap tahunnya hanya mengalami sedikit peningkatan karena anggaran yang terealisasi hanya sedikit diatas 100%. Untuk derajat desentralisasi, maka Pemerintah Kota Pariaman mengalami fluktuatif kinerja PAD , tetapi dapat dikatakan Pemerintah Kota Pariaman sudah berusaha menggefektifkan PAD dan dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Pariaman masih bergantung dari dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahannya.
3. Kinerja Belanja Pemerintah Kota Pariaman mengalami penurunan di tahun 2005 sampai tahun 2006 namun Pemerintah Kota Pariaman dapat meningkatkan kembali keefisienan belanjanya pada tahun 2007.
4. Dari segi pembiayaan, Pemerintah Kota Pariaman memiliki kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal daerah yang sangat baik yang ditandai dengan SiLPA Pemerintahan Kota Pariaman dari tahun 2004 sampai tahun 2007 bernilai positif
5. Pemerintahan Kota Pariaman mengalami pertumbuhan kas yang sangat signifikan dan membanggakan pada tahun anggaran 2007 yaitu sebesar 214,89 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Erlangga: Jakarta.
- BPS Kota Padang. 2007. "Pariaman Dalam Angka". Badan Pusat Statistik Pariaman.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*. YKPN: Yogyakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*. Salemba Empat: Yogyakarta.
- Indriantoro, Nur. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi Pertama*. BPFE : Yogyakarta
- Mahmudi. 2007. *Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____, *Keputusan Menteri Nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.